



## **Menjelajahi Risiko, Mengelola Keamanan, dan Menerima Dukungan Perlindungan: Sebuah Studi Pembela Hak Asasi Manusia yang Menghadapi Risiko di Indonesia**

### **Ringkasan Temuan**

Alice M. Nah, Katrina Maliamauv, Patricia Bartley,  
Indria Fernida dan Budi Hernawan<sup>1</sup>

#### **Pendahuluan**

Makalah ini menyajikan temuan-temuan utama yang diperoleh dari sebuah penelitian tentang bagaimana para pembela HAM mengelola resiko dan keamanan pribadi mereka serta menerima dukungan perlindungan di Indonesia.<sup>2</sup> Kami mewawancarai para pembela HAM yang berpengalaman menghadapi resiko atau ancaman selama lima tahun terakhir, baik secara terpisah maupun dalam kelompok fokus diskusi, dan meminta mereka mengisi survei. Kami menggunakan definisi ‘pembela HAM’ seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia<sup>3</sup> yaitu siapapun yang memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Makalah ini menyorot beberapa temuan utama yang muncul termasuk di antaranya dampak dari ancaman dan serangan yang dialami peserta; perasaan tentang keamanan; langkah-

---

<sup>1</sup> Diterjemahkan oleh Kurniati Shinta Dewi. Referensi: Nah, AM; Maliamauv, K; Bartley, P; Fernida, I dan Hernawan, B (2017) Menjelajahi Risiko, Mengelola Keamanan, dan Menerima Dukungan Perlindungan: Sebuah Studi Pembela Hak Asasi Manusia yang Menghadapi Risiko di Indonesia, Ringkasan Temuan, Centre for Applied Human Rights, University of York: York. Versi awal ringkasan temuan ini disajikan di sebuah lokakarya yang diorganisir oleh Yayasan Perlindungan Insani / Protection International Indonesia dan Komnas Perempuan di Jakarta, 13 September 2016.

<sup>2</sup> Penelitian ini juga dilakukan di empat Negara lain – Kolombia, Meksiko, Mesir, dan Kenya – menggunakan protokol penelitian yang sama. Untuk informasi lebih lanjut tentang proyek ini, lihat:

<http://securityofdefenders.org/>

<sup>3</sup> Secara resmi dikenal dengan nama *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*, dan bisa dilihat di <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationBahasa.pdf>

langkah pengamanan yang mereka lakukan; pengalaman mereka mengikuti pelatihan keamanan; sejauh mana dukungan yang mereka terima untuk kerja HAM; hambatan umum dalam mengelola keamanan; refleksi mengenai kesejahteraan dan perlindungan diri; dan persepsi tentang 'Pembela HAM'.

### **Peserta Studi**

Jumlah total peserta dalam studi ini adalah 87 orang, terdiri dari 47 lelaki, 39 perempuan dan satu orang transgender.<sup>4</sup> Mereka berasal dari berbagai latar belakang dan terlibat dalam beragam kegiatan hak asasi manusia di Manokwari, Jayapura, Banda Aceh, Palu, Poso, Morowali, Malang, Jakarta, Maluku, Ambon dan Surabaya, termasuk mengenai isu-isu anti-korupsi, kebebasan beragama, hak atas lahan, hak perempuan, hak LGBTI, dan hak asasi dalam situasi konflik.

Para peserta berusia antara 23-70 tahun, dengan usia rata-rata 39,8 tahun. Sebanyak 54,3% di antaranya sudah menikah atau tinggal bersama pasangan mereka, 22,2% sedang menjalin hubungan, dan 23,5% lajang. Sebanyak 61% memiliki anak, sementara 67,1% tinggal dan bekerja di wilayah perkotaan dan pedesaan atau luar kota, 22,0% tinggal dan bekerja di wilayah perkotaan sementara 4,9% tinggal dan bekerja di wilayah pedesaan atau luar kota. Sebanyak 85,2% di antaranya bekerja sedangkan 7,4% adalah pekerja lepas dan 7,4% tidak memiliki pekerjaan.

Sebanyak 74.7% di antaranya melakukan pekerjaan HAM mereka sebagai karyawan atau sukarelawan pada organisasi yang telah terdaftar (misalnya LSM, universitas, perkumpulan, organisasi sosial, media, firma hukum, kantor media, organisasi keagamaan, kantor pemerintah); 31,3% menggambarkan diri mereka melakukan kerja HAM sebagai anggota kelompok, komunitas atau jejaring informal/tidak terdaftar; dan 24.1% menggambarkan diri mereka melakukan pekerjaan HAM secara sendiri.<sup>5</sup>

Para peserta menyatakan telah melakukan kerja HAM selama 1 hingga 50 tahun, dengan rata-rata bekerja sekitar 10 tahun. Sebagian besar dari mereka (65%) lebih sering memimpin pekerja-pekerja lain (alih-alih menjadi pengikut orang lain).

### ***Jenis ancaman dan serangan yang dialami***

Jenis ancaman dan serangan yang paling sering disebut oleh para peserta adalah pelecehan dan ancaman melalui telepon atau pesan. Selain itu jenis ancaman dan serangan juga mencakup ancaman fisik; ancaman terhadap anggota keluarga; dikuntit, dipantau, atau dimasukkan dalam pengawasan; dijadikan target penyelidikan dan dakwaan kriminal; dan digambarkan secara negatif atau dicemarkan nama baiknya di media. Beberapa – terutama kalangan akademik dan jurnalis – mendapat konsekuensi profesional (misalnya diturunkan pangkatnya, dipecat, atau dipindahkan). Perempuan pembela HAM, pembela LGBTIQ\* dan

---

<sup>4</sup> Sebagian besar mengikuti wawancara (baik secara individu maupun dalam kelompok fokus) dan mengisi survei. Namun sebagian kecil di antara peserta hanya mengisi survei.

<sup>5</sup> Peserta boleh menjawab lebih dari satu pilihan.

pembela HIV+ juga menggambarkan sulitnya hidup dalam hukum, praktek dan budaya yang diskriminatif.

### ***Jenis pelaku***

Jenis pelaku yang paling sering disebut oleh peserta adalah aktor negara, terutama polisi, militer, intelejen, serta anggota dewan perwakilan rakyat, kepala desa, dan pejabat pemerintah. Jenis pelaku yang paling umum kedua dan ketiga adalah perusahaan (terutama bagi mereka yang menangani isu hak lingkungan dan hak buruh), dan kelompok fundamentalis keagamaan (terutama bagi mereka yang menangani isu hak perempuan, hak LGBTIQ\*, dan kebebasan beragama).

Bagi beberapa peserta, ancaman dan serangan juga berasal dari kelompok-kelompok intoleran, anggota masyarakat (terutama mereka yang mudah dipengaruhi atau dibayar untuk melakukan serangan), kelompok bersenjata, dan warga sipil bersenjata. Para peserta mengungkapkan kekhawatiran bahwa mereka sulit mengidentifikasi pelaku sehingga sulit mengantisipasi dan mencegah ancaman. Para pelaku kekerasan virtual (*bully*) di media sosial juga disebut sebagai pelaku oleh beberapa peserta.

### ***Dampak dari ancaman dan serangan yang dialami***

Sebanyak 89% peserta mengatakan bahwa mereka ‘agak peduli’ atau ‘sangat peduli’ terhadap keselamatan diri mereka<sup>6</sup>, sedangkan 91% peserta ‘agak peduli’ atau ‘sangat peduli’ terhadap keamanan digital mereka. Sementara itu 88% ‘agak peduli’ atau ‘sangat peduli’ terhadap kesejahteraan mental dan emosional mereka.

Para peserta yang kami wawancarai berbicara tentang dampak mental dan emosional dari ancaman yang mereka hadapi – misalnya kelelahan mental, trauma, dan “mati rasa”.<sup>7</sup> Mengenai resiko bagi pekerja HAM, salah seorang perempuan pembela HAM berkata,

Mereka membutuhkan ruang untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa harus berbicara tentang pekerjaan sepanjang waktu sehingga bisa menikmati hidup mereka. Saya takut mereka jadi frustrasi lalu suatu hari memilih jalan yang berbeda, yang bertentangan dengan nilai-nilai yang saat ini mereka pegang.<sup>8</sup>

Mereka juga merasa terisolasi dan terikat stigma tentang pekerjaan mereka. Salah satu peserta dari sebuah organisasi HAM terkenal di Jayapura menyatakan:

Keluarga besar saya kadang berkata sinis, ‘Apa kamu bisa makan hak asasi manusia?’ Saya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Seluruh jalan sudah tertutup. Saya

<sup>6</sup> Para peserta diberi pilihan berikut: ‘tidak tahu’, ‘tidak peduli sama sekali’, ‘tidak terlalu peduli’, ‘agak peduli’ dan ‘sangat peduli’.

<sup>7</sup> Peserta yang menangani hak atas lingkungan dan anti-korupsi di Manokwari, diwawancarai bulan September 2015; Peserta yang menangani kebebasan berekspresi di Jayapura, diwawancarai bulan Januari 2016; Peserta yang menangani hak sipil dan politik di Aceh, diwawancarai bulan Maret 2016.

<sup>8</sup> Peserta yang menangani hak buruh dan hak-hak sipil politik di Malang, diwawancarai bulan November 2015.

merasa seperti hidup dalam sangkar. Saya menenggelamkan diri di Internet karena di situ saya menemukan kebebasan. Saya tidak paranoid. Saya merasa baik-baik saja. Tapi saya tidak pernah lagi pergi ke gereja. Orang-orang tidak mau berjabat tangan dengan saya, terutama non-Papua.<sup>9</sup>

Beberapa peserta mengungkapkan kekhawatiran bahwa mereka akan harus berhenti melakukan kerja HAM, dan karenanya melawan prinsip mereka sendiri serta hidup tanpa “mengikuti nilai-nilai yang mereka yakini”, dan ini sulit mereka terima.

Para peserta juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai dampak kerja HAM yang mereka lakukan terhadap anggota keluarga dan orang-orang yang mereka kasih. Seorang peserta yang menangani isu hak LGBTI di Aceh bercerita,

Menurut hukum pidana Aceh, hukuman terhadap LGBT adalah cambuk. Kalau saya dihukum cambuk, keluarga saya juga terkena dampak karena hukum cambuk dilakukan di muka umum. Keluarga saya bisa dikucilkan dari desa dan saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan tinggal di Aceh.<sup>10</sup>

Para peserta dalam studi ini juga dirugikan secara keuangan akibat ancaman yang mereka terima, tidak hanya karena dampaknya terhadap gaya hidup dan penghidupan mereka (misalnya kehilangan pekerjaan atau diturunkan pangkatnya) tetapi juga karena biaya yang harus dikeluarkan untuk langkah-langkah pengamanan, misalnya menggunakan transportasi yang lebih aman, peralatan dan perangkat keamanan, asuransi, pindah tempat tinggal, ongkos hukum, denda, dan penjaminan keluar penjara. Para peserta juga menggambarkan kesulitan yang mereka hadapi karena upah rendah dan pekerjaan tidak mapan terkait pendanaan.

Untuk mengelola keselamatan pribadi, banyak dari para pembela HAM yang harus melakukan perubahan besar dalam gaya hidup mereka, cara mereka berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana mereka menjalankan kerja HAM (dijelaskan lebih lengkap pada bagian berjudul *Upaya Mengelola Keselamatan*). Para peserta juga kehilangan kebebasan dan kemerdekaan pribadi karena langkah-langkah pengamanan ini, serta sangat khawatir terhadap keselamatan anggota keluarga dan orang-orang yang mereka kasih.

### **Perasaan tentang Keselamatan**

Tanggapan peserta untuk pertanyaan, “Apa yang membuat anda merasa aman?” adalah sebagai berikut:

- Hubungan pribadi
- Dukungan untuk pekerjaan dari orang lain
- Prinsip, nilai dan keyakinan yang mereka pegang
- Jejaring, kolaborasi, dan bekerjasama dengan orang lain

<sup>9</sup> Peserta yang menangani isu hak sipil dan politik di Jayapura, diwawancarai bulan Desember 2015.

<sup>10</sup> Peserta yang menangani isu hak LGBTI di Aceh, diwawancarai bulan November 2015.

- Perlindungan hukum
- Agama, spiritualitas
- Pengakuan profesional (memiliki status di masyarakat, misalnya menjadi akademika atau pengacara; memiliki lisensi; atau menjadi anggota serikat)
- Memiliki rencana keselamatan dan prosedur operasional standar yang dapat diikuti

Tanggapan peserta untuk pertanyaan, “Apa yang membuat anda merasa tidak aman?” adalah sebagai berikut:

- Kurangnya perlindungan hukum, termasuk impunitas dan kurangnya akuntabilitas aktor negara
- Resiko yang mengancam keluarga atau orang yang mereka kasahi
- Kurangnya sumber daya, termasuk kemampuan finansial
- Keberadaan militer, atau berinteraksi dengan pejabat pemerintah
- Kurangnya pemahaman atau dukungan dari orang lain (termasuk menghadapi prasangka dan diskriminasi)
- Menonjol dalam lingkungan kerja HAM

## Upaya Mengelola Keselamatan

Kami bertanya kepada para peserta dalam studi ini seberapa sering mereka mengambil upaya keselamatan yang umum dilakukan.

*Tabel 1: Frekuensi Sejumlah Upaya Pengelolaan Keselamatan*

Upaya Pengelolaan Keselamatan	Persentase peserta yang 'sering', 'hampir selalu' atau 'selalu' mengambil langkah ini
Menilai resiko dalam kerja HAM mereka	60.1% <sup>11</sup>
Secara proaktif menangani resiko yang muncul dalam kerja HAM mereka	63.4% <sup>12</sup>
Mengikuti 'rencana keamanan' pribadi (apa yang harus dilakukan untuk menanggapi ancaman tertentu)	58.8% <sup>13</sup>
Ketika melakukan pekerjaan yang sensitif, memastikan agar ada orang lain yang tahu kemana mereka pergi dan apa yang mereka lakukan	63,0% <sup>14</sup>
Sebelum melakukan pekerjaan yang sensitif, membuat rencana penanganan keadaan darurat jika terjadi hal yang darurat	50.6% <sup>15</sup>

Seperti disebutkan sebelumnya, para peserta dalam studi ini terlibat dalam berbagai upaya demi keselamatan pribadi mereka.

Langkah yang paling umum disebut adalah *menerima bantuan dari orang lain*, terutama sesama Pembela HAM (lihat juga Tabel 2 di bawah ini). Mereka juga menerima bantuan dari teman, rekan kerja, anggota keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Beberapa di antaranya menerima bantuan dari kedutaan, institusi keagamaan, pihak berwenang negara, dan pengacara.

Para peserta menyatakan pentingnya *membangun sekutu* sebagai strategi kunci dalam upaya keselamatan mereka. Hal ini membantu memperkuat kerja mereka, meminimalisir resiko yang dihadapi, menelaah kondisi keamanan secara lebih efektif, dan mengembangkan jejaring bantuan. Secara khusus, para peserta menyatakan pentingnya bersekutu dan berjejaring dengan para pembela HAM lainnya, masyarakat akar rumput,

<sup>11</sup> Persentase di negara lain: Kolombia 55,4%, Meksiko 59,7%, Kenya 71,1%, Mesir 51,3% (Rata-rata 59,5%).

<sup>12</sup> Persentase di negara lain: Kolombia 58,1%, Meksiko 67,1%, Kenya 66,7%, Mesir 39,5% (Rata-rata 59,0%).

<sup>13</sup> Persentase di negara lain: Kolombia 42,7%, Meksiko 58,0%, Kenya 64,0%, Mesir 34,6% (Rata-rata 51,6%).

<sup>14</sup> Persentase di negara lain: Kolombia 77,4%, Meksiko 90,4%, Kenya 80,3%, Mesir 71,8% (Rata-rata 76,6%).

<sup>15</sup> Persentase di negara lain: Kolombia 52,7%, Meksiko 63,0%, Kenya 70,3%, Mesir 53,9% (Rata-rata 58,1%).

perwakilan pemerintah (termasuk polisi dan aparat keamanan negara), media, pemimpin setempat, academia, LSM internasional, dan kelompok-kelompok keagamaan.

Pada beberapa kasus, peserta harus *memindahkan* tempat tinggal mereka sendiri atau keluarga mereka, baik sementara maupun seterusnya. Beberapa harus pindah berkali-kali. Meskipun perpindahan tempat tinggal ini membantu mereka (dan keluarga mereka) tetap aman, akibatnya adalah mereka merasa terisolasi dan terpisah dari orang-orang yang mereka cintai. Beberapa juga mengandalkan *pendampingan*, baik yang disediakan secara resmi melalui organisasi atau yang diatur dengan bantuan teman dan keluarga.

Beberapa peserta berupaya *mengurangi popularitas* demi keselamatan mereka sendiri, misalnya dengan cara tetap di rumah, mengurangi kegiatan di sosial media dan kemunculan di media masa, menyamarkan penampilan mereka di mukan umum, dan menghindari orang-orang dan tempat-tempat tertentu. Sebaliknya, beberapa peserta justru menerapkan strategi *meningkatkan popularitas* kerja dan resiko yang mereka hadapi, misalnya dengan menggunakan media sosial untuk membahas pekerjaan mereka, mengeluarkan pernyataan pers, kolaborasi membuat dokumenter, dan terlibat dalam beberapa kegiatan lain yang terkait media.

Sejumlah kecil peserta menyebutkan pentingnya memiliki *asuransi*. Secara khusus, seorang peserta HIV+ menyatakan bahwa asuransi kesehatan adalah bagian yang sangat penting dari rencana 'keamanan' dalam kerja hak asasi manusia. Seorang peserta lain menyatakan bahwa asuransi yang disediakan oleh organisasinya sangat penting dalam memberikan rasa aman.

Lebih sedikit peserta yang menyebut tentang penggunaan kamera CCTV, sebuah hal yang sepertinya justru lebih umum di negara lain.

### **Pelatihan Keselamatan**

59.3% peserta menyatakan bahwa mereka pernah menerima pelatihan tentang pengelolaan keamanan. Peserta lelaki menerima lebih banyak pelatihan dibandingkan peserta perempuan (67,4% peserta lelaki dan 48,6% peserta perempuan). Jumlah rata-rata pelatihan yang diterima yaitu 1,27 per orang.

Mereka yang telah menerima pelatihan menganggap bahwa pelatihan semacam ini sangat bermanfaat untuk mengenali dan mengurangi resiko. Rekomendasi untuk pelatihan di masa depan menekankan pada langkah-langkah yang lebih praktis dan nyata. Bentuknya bisa berupa studi kasus, simulasi ancaman dan bermain peran. Beberapa peserta menyarankan agar pelatihan diadakan di wilayah konflik dan latihan praktek dilakukan di lapangan. Rekomendasi lain termasuk penggunaan material yang berfokus pada berbagai situasi kerja yang berbeda, modul yang lebih sederhana, dan mengaitkan HRD dengan organisasi perlindungan. Secara luas terdapat konsensus

bahwa pelatihan harus lebih sering diadakan beserta sesi tindak lanjut dan rencana aksi per individu.

### Tingkat Dukungan untuk Kerja Hak Asasi Manusia

Para peserta dalam studi ini melaporkan bahwa dukungan yang mereka terima dalam kerja hak asasi manusia mereka sangatlah tinggi.

*Tabel 2: Tingkat Dukungan yang Diterima untuk Kerja Hak Asasi Manusia*

Tingkat dukungan dari sumber berikut digambarkan sebagai 'Tinggi' atau 'Sangat Tinggi':	Persentase peserta di Indonesia
Pasangan	63.8% <sup>16</sup>
Orangtua	61.9% <sup>17</sup>
Teman Dekat	74.3% <sup>18</sup>
Orang yang melakukan kerja HAM di negara yang sama	75.6% <sup>19</sup>
Orang yang melakukan kerja HAM di negara lain	58.3% <sup>20</sup>

<sup>16</sup> Persentase di negara lain: Kolombia 55,1%, Meksiko 64,4%, Kenya 52,0%, Mesir 48,7% (Rata-rata 56,8%).

<sup>17</sup> Persentase di negara lain: Kolombia 48,7%, Meksiko 53,5%, Kenya 35,1%, Mesir 21,3% (Rata-rata 44,1%).

<sup>18</sup> Persentase di negara lain: Kolombia 53,8%, Meksiko 78,1%, Kenya 61,1%, Mesir 68,4% (Rata-rata 67,1%).

<sup>19</sup> Persentase di negara lain: Kolombia 64,5%, Meksiko 73,0%, Kenya 70,2%, Mesir 65,3% (Rata-rata 69,7%).

<sup>20</sup> Persentase di negara lain: Kolombia 47,4%, Meksiko 45,2%, Kenya 37,7%, Mesir 58,7% (Rata-rata 49,5%).

### Penghalang terhadap Pengelolaan Keamanan

Kami meminta peserta mengidentifikasi seberapa pentingnya penghalang tertentu dalam mengelola keamanan.<sup>21</sup>

*Tabel 3: Hambatan dalam Pengelolaan Keamanan*

Hambatan dalam pengelolaan keamanan dinyatakan sebagai 'penghalang yang sangat penting' atau 'penghalang yang agak penting':	Persentase peserta in Indonesia
Kurangnya dukungan teknis dari ahli keamanan	79,0% <sup>22</sup>
Kurangnya pengetahuan	75,4% <sup>23</sup>
Kurangnya uang	70,3% <sup>24</sup>
Kurangnya dukungan dari para pemimpin dalam organisasi/kelompok saya	65,0% <sup>25</sup>
Kurangnya dukungan dari keluarga	64,4% <sup>26</sup>
Kurangnya dukungan dari kawan dekat	58,1% <sup>27</sup>

Dalam studi ini, lebih banyak perempuan (89,2%) yang menyatakan kurangnya dukungan teknis sebagai hambatan signifikan dibandingkan laki-laki (67,5%). Peserta perempuan juga menyatakan menerima lebih sedikit pelatihan daripada peserta laki-laki.

Alasan utama yang diberikan mengapa perlindungan-diri tidak menjadi prioritas adalah keyakinan bahwa resiko bukanlah hal yang melekat pada pekerjaan yang mereka pilih. Salah seorang peserta perempuan berkata,

Orang-orang yang bekerja dalam bidang hak asasi manusia menyadari bahwa mereka akan menghadapi resiko, tetapi sebagian besar menyadari bahwa ini adalah pilihan hidup mereka. Mereka harus kuat. Karenanya mereka tidak terlalu peduli tentang perlindungan bagi diri sendiri.

Hal ini tidak bisa dipisahkan dari persepsi luas tentang 'pahlawan' dalam budaya Indonesia di mana pengorbanan dan ketidakpedulian pada kepentingan diri sendiri merupakan faktor

<sup>21</sup> Peserta diberi pilihan berikut: 'Hambatan sangat signifikan', 'Hambatan cukup signifikan' dan 'Hambatan tidak terlalu signifikan'.

<sup>22</sup> Persentase di negara lain: Kolombia 66,2%, Meksiko 73,6%, Kenya 89,4%, Mesir 78,6% (Rata-rata 77,0%).

<sup>23</sup> Persentase di negara lain: Kolombia 65,8%, Meksiko 71,9%, Kenya 57,9%, Mesir 73,7% (Rata-rata 68,9%).

<sup>24</sup> Persentase di negara lain: Kolombia 86,4%, Meksiko 82,1%, Kenya 92,2%, Mesir 73,1% (Rata-rata 80,8%).

<sup>25</sup> Persentase di negara lain: Kolombia 38,4%, Meksiko 43,8%, Kenya 54,0%, Mesir 53,4% (Rata-rata 50,9%).

<sup>26</sup> Persentase di negara lain: Kolombia 25,0%, Meksiko 16,2%, Kenya 25,0%, Mesir 55,9% (Rata-rata 37,3%).

<sup>27</sup> Persentase di negara lain: Kolombia 33,8%, Meksiko 22,9%, Kenya 35,5%, Mesir 48,6% (Rata-rata 39,8%).

identifikasi utama. Karenanya, para pembela HAM yang melayani hak orang lain dipandang sebagai dan mendapat citra sebagai mereka yang harus siap mengorbankan kehidupan pribadi dan kesejahteraan diri bagi orang lain. Persepsi ‘pahlawan’ ini tidak hanya mempengaruhi cara masyarakat memperlakukan para pembela HAM tetapi juga mempengaruhi perilaku organisasi masyarakat sipil dan donor.

### **Refleksi mengenai Kesejahteraan dan Perlindungan-diri**

Dari seluruh peserta yang membahas kesejahteraan selama wawancara, sepertiganya menyatakan bahwa seorang pembela HAM umumnya tidak mengutamakan kesejahteraan mereka sendiri.

Sekitar setengahnya menyatakan bahwa kesejahteraan dan perlindungan bagi para penyintas lebih utama. Seperti yang dinyatakan seorang perempuan pembela HAM yang menangani isu hak atas lingkungan dan hak minoritas di Aceh, “Biasanya kami hanya mengurus perlindungan bagi klien atau korban yang sedang kami bantu. Kami lupa tentang hak kami sendiri. Kami menyadari [bahwa ini adalah hal penting], tetapi kami tidak mengutamakan.”<sup>28</sup> Seorang perempuan pembela HAM juga menyatakan meskipun dia memahami bahwa kebutuhan dirinya juga penting, dia merasa “egois” apabila memberi prioritas terhadap kebutuhannya sendiri alih-alih berfokus pada orang lain.<sup>29</sup>

Citra bahwa seorang pembela HAM harus kuat, dan juga ‘terlihat kuat’, muncul dalam komentar-komentar peserta lain. Beberapa meyakini bahwa membicarakan rasa takut dan kekhawatiran mereka justru akan ‘memperbesar resiko’. Beberapa di antaranya bahkan menyatakan kekhawatiran bahwa membicarakan rasa takut dan resiko yang mereka hadapi secara terbuka akan membuat orang lain ragu melakukan kerja HAM.

Sekitar setengah dari mereka yang membahas kesejahteraan juga melakukan kegiatan yang berfokus pada kesehatan mental dan emosional mereka. Akan tetapi, seluruh kegiatan yang disebut bersifat ‘pribadi’ (misalnya menghabiskan waktu bersama keluarga, melakukan hobi, dan berdoa). Dalam hal ini, hubungan pribadi merupakan bagian penting dari bahasan peserta tentang strategi kesejahteraan, perlindungan, dan keselamatan mereka.

Peserta tidak menyebutkan ‘kegiatan kesejahteraan’ yang menjadi bagian dari budaya organisasi. Hanya satu peserta yang menyatakan mencari pelayanan kesehatan mental melalui organisasinya untuk menangani pengalaman trauma. Seorang peserta lain menyatakan bahwa kesejahteraan tidak dianggap serius dalam organisasi, dan bahwa rekan-rekan kerjanya ‘menertawai ketika ia menyatakan kekhawatiran’. Peserta ini berkata,

Kami juga tidak mendapat dukungan dari rekan kerja kami ketika menghadapi masalah. Mereka menganggap masalah itu hanya ‘masalah sepele’. Misalnya, ketika rekan kami menerima surat panggilan interogasi dari polisi, rekan-rekan lain membuatnya menjadi gurauan dan berkata, “Tenang, nanti kita temani. Kita

---

<sup>28</sup> Peserta yang menangani hak atas lingkungan dan hak minoritas di Aceh, diwawancarai bulan April 2016.

<sup>29</sup> Peserta yang menangani hak pekerja migran dan perempuan, diwawancarai di Jakarta bulan Januari 2016.

bawakan makanan setiap hari kalau kamu ditahan.” Kami semua tertawa. Menurut pengalaman saya, saya yakin mereka juga merasa khawatir. Saya merasa kami tidak menerima dukungan moral.<sup>30</sup>

Bagi beberapa peserta, menenggelamkan diri dalam pekerjaan itu sendiri merupakan kunci kesejahteraan. Mereka sering berkata bahwa prinsip dan nilai yang mereka pegang adalah alasan mengapa mereka melakukan pekerjaan hak asasi manusia, dan ini menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Kesejahteraan mereka datang dari kesadaran bahwa mereka melakukan pekerjaan yang merupakan ‘panggilan hati’. Mereka juga belajar dari para penyintas pelanggaran dan kekerasan HAM tentang bagaimana mengatasi kesulitan, dan memperoleh kekuatan dan dukungan dari komunitas sesama aktivis.

Kerentanan finansial merupakan salah satu aspek kesejahteraan yang dibahas peserta. Beberapa mengungkapkan kekhawatiran tentang kurangnya keamanan sosial dan jaminan sosial; beberapa dari mereka tidak memiliki tabungan atau persiapan untuk masa tua. Beberapa juga menyebutkan pentingnya mengetahui bahwa keluarga mereka akan aman apabila sesuatu terjadi pada diri mereka.

### **Persepsi terhadap Pembela HAM**

Dari seluruh peserta studi, hanya 46% yang menyebut diri sebagai pembela HAM.

Sekitar sepertiga dari peserta yang diwawancarai terpisah (32,7%) berpikir bahwa istilah ‘pembela HAM’ dipandang negatif di negara, sementara hanya 14,2% yang berpikir bahwa istilah tersebut dipandang positif, dan 53,1% berpikir bahwa orang-orang memiliki persepsi beragam tentang Pembela HAM.<sup>31</sup>

Peserta melihat bahwa masyarakat umumnya tidak begitu mengenal istilah ‘pembela HAM’. Ada pandangan luas bahwa istilah ini bersifat ‘eksklusif’, yang hanya dipakai terutama di lingkungan hak asasi manusia. Para peserta menyatakan bahwa masyarakat umum lebih mengenal istilah ‘LSM’, ‘aktivis’, ‘pembela umum’, dan ‘pendamping masyarakat’.

Akan tetapi kurangnya pengenalan terhadap istilah tadi tidak otomatis berarti kurangnya dukungan bagi pekerjaan yang dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh dua orang peserta, masyarakat mungkin tidak terlalu mengenal istilah ‘pembela HAM’, tetapi masyarakat mengenali pekerjaan yang mereka lakukan.<sup>32</sup> Penghormatan yang diperoleh dari kerja mereka menambah dukungan masyarakat bagi keselamatan mereka.<sup>33</sup> Seorang peserta lain berkata, “masyarakat tidak memahami dan cenderung tidak peduli terhadap [istilah] ‘pembela HAM’. Akan tetapi, apabila mereka menemui masalah, mereka akan meminta bantuan kami.”<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Peserta yang menangani isu anti-korupsi di Jakarta, diwawancarai bulan Januari 2016.

<sup>31</sup> Berdasarkan transkrip dari 49 individu.

<sup>32</sup> Peserta yang menangani isu kebebasan berekspresi di Jayapura, diwawancarai bulan Januari 2016; Peserta yang menangani hak sipil dan politik di Aceh, diwawancarai bulan Maret 2016.

<sup>33</sup> Peserta yang menangani isu kebebasan berekspresi di Jayapura, diwawancarai bulan Januari 2016.

<sup>34</sup> Peserta yang menangani anti-korupsi di Jakarta, diwawancarai bulan Januari 2016.

Kurangnya pengenalan dan pemahaman terhadap apa atau siapa ‘Pembela HAM’ mendorong beberapa peserta merekomendasikan agar para pembela HAM, mereka yang berkepentingan dalam menyediakan perlindungan, dan aktor negara memberikan edukasi kepada masyarakat umum (dan diri mereka sendiri) mengenai istilah tersebut.

Di Papua, beberapa orang mengartikan Pembela HAM secara negatif sebagai ‘aktivis kemerdekaan’ atau ‘separatis’. Di tempat lain, Pembela HAM kadang dipandang sebagai ‘penghambat pembangunan’ dan ‘anti-pemerintah’. Di Aceh, mereka kadang dituduh anti-Islam, terutama ‘anti-Syariah’, dan “sekuler, pluralis, liberal, imperialis”.<sup>35</sup>

Ketika masyarakat mengartikan kerja Pembela HAM secara positif (seringnya oleh komunitas akar rumput atau warga desa), mereka juga seringkali memandang pembela HAM sebagai orang yang ‘tidak kenal takut’, yang kemudian menimbulkan harapan yang tidak realistis. Salah satu perempuan pembela HAM berkata,

Istilah Pembela HAM di Indonesia sangatlah eksklusif. Masyarakat berpikir Pembela HAM adalah manusia super atau orang yang berani mati menghadapi resiko tinggi dalam pekerjaan. Akan tetapi, masyarakat tidak mengerti bahwa siapapun – selama mereka membela berbagai hak asasi dan bicara tentang kebenaran dan keadilan – bisa disebut Pembela HAM. Masalahnya, masyarakat tidak mengerti istilah Pembela HAM yang sebenarnya. Istilah ini harus terus disebarluaskan.”<sup>36</sup>

## **Rekomendasi**

Berikut adalah beberapa rekomendasi dari peserta studi.

### ***Rekomendasi untuk Aktor Negara***

Secara luas, rekomendasi peserta kepada Negara terpusat pada pengakuan kerja Pembela HAM, edukasi bagi aktor negara mengenai hak Pembela HAM, dan menetapkan kebijakan yang melindungi hak dan pekerjaan para Pembela HAM. ‘Lingkungan di mana mereka bisa bekerja tanpa rasa takut’ seringkali dinyatakan peserta sebagai dasar bagi rasa aman. Inti dari rasa aman ini adalah lingkungan hukum, administratif, sosial dan budaya yang secara aktif mendukung kerja Pembela HAM dan menjamin akuntabilitas atas kekerasan.

### ***Rekomendasi untuk Aktor Pelindung***

Para peserta dalam studi ini juga memberikan rekomendasi berikut kepada pihak yang menyediakan dukungan dan bantuan perlindungan kepada Pembela HAM, termasuk organisasi masyarakat sipil, kedutaan, badan PBB dan donor.

---

<sup>35</sup> Peserta yang menangani isu kebebasan beragama di Aceh, diwawancarai bulan Maret 2016.

<sup>36</sup> Peserta yang menangani isu hak buruh dan hak sipil politik di Malang, diwawancarai bulan November 2015.

- Memahami hambatan keuangan yang dialami para pembela HAM ketika menghadapi resiko, dan menyediakan dukungan keuangan. Para donor terutama perlu mengakui pentingnya menyediakan dana untuk pencegahan dan mitigasi resiko serta berbagai kegiatan lain terkait perlindungan. Hal-hal ini harus dimasukkan ke dalam rencana dan anggaran tahunan untuk organisasi-organisasi hak asasi manusia.
- Ikut mempertimbangkan keluarga para pembela HAM dan memasukkan kesejahteraan mereka dalam upaya perlindungan
- Memikirkan solusi jangka-panjang untuk isu keselamatan, tidak hanya tindakan darurat (misalnya rumah singgah, dana darurat, cuti panjang, pelatihan pengamanan-diri)
- Melobi negara agar tercipta mekanisme perlindungan yang lebih baik bagi Pembela HAM yang menghadapi resiko
- Ketika memfasilitasi relokasi, pastikan bahwa sistem pendukung sudah tersedia selama perpindahan dan setelah Pembela HAM kembali. Program relokasi untuk Pembela HAM harus mencakup pekerjaan atau kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan HAM mereka. Perlu juga dipahami bahwa relokasi itu sendiri tidak cukup, dan bahwa bantuan kesehatan mental (misalnya untuk mengatasi trauma) sangatlah penting.
- Melibatkan Pembela HAM dalam merancang, mengembangkan dan menerapkan rencana perlindungan dan pengaturan keselamatan dengan cara yang transparan sehingga upaya-upaya ini memberdayakan mereka.
- Mengakui bahwa beberapa upaya perlindungan, meskipun bertujuan baik, juga dapat berdampak negatif. Misalnya, pendampingan dapat berarti hilangnya privasi.
- Meningkatkan kesadaran di antara para aktivis, pengorganisasi masyarakat, dan semacamnya tentang hak mereka untuk membela HAM. Mereka mungkin menghadapi berbagai resiko namun tidak menganggap diri mereka sebagai Pembela HAM atau tidak dipandang sebagai Pembela HAM oleh pihak lain.
- Menerapkan sistem koordinasi yang lebih baik di dalam jejaring HAM sehingga dapat merespon lebih cepat terhadap permintaan perlindungan.
- Melibatkan organisasi profesional pengacara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mekanisme perlindungan kepada pembela HAM.